

Judul : Senayan mendukung langkah pemerintah, pengangkatan terpusat, bisa tingkatkan kesejahteraan guru
Tanggal : Minggu, 20 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Senayan Mendukung Langkah Pemerintah Pengangkatan Terpusat, Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Senayan mendukung langkah Pemerintah Pusat (Pempus) mengambil alih pengangkatan guru nasional. Kebijakan tersebut diharapkan para guru bisa semakin sejahtera.

WAKIL Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pengangkatan guru nasional oleh Pempus bisa menjadi momentum untuk membenahi tata kelola guru secara nasional. Tujuannya agar lebih objektif, terukur, dan benar-benar berdasarkan kebutuhan serta kualitas.

"Pengelolaan pengangkatan guru secara lebih terpusat dapat memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik bagi para pendidik," kata Lalu Hadrian di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, Pempus akan mengambil alih pengangkatan guru nasional. Karena perbaikan pendidikan dimulai dari proses rekrutmen guru. "Sekarang kalau tidak salah, kita sedang bicarakan hak mengangkat guru kembali ke Pemerintah Pusat," kata Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip Kamis, (17/9/2026).

Lalu Hadrian melanjutkan, sistem tersebut dirancang agar guru tidak mudah terseret atau dimanfaatkan dalam kepentingan politik praktis di tingkat daerah.

Karena guru harus fokus mendidik anak-anak bangsa. Jangan sampai proses pengangkatan atau keberlanjutan karier guru dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis di daerah.

Dia menegaskan, pengambilan kewenangan pengangkatan guru tidak boleh berhenti pada perubahan administrasi dan tata kelola kepegawaian. Kebijakan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru secara nyata. Jangan sampai hanya memindahkan kewenangan pengangkatan dari daerah ke pusat, tetapi kesejahteraan guru tidak berubah.

Ia menyebut, masih banyak guru menerima penghasilan yang belum sebanding dengan beban dan tanggung jawab profesinya. Karena itu, pembenahan sistem rekrutmen perlu berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan, kepastian status kepegawaian, perlindungan profesi, serta akses pengembangan kompetensi.

Dia menambahkan, guru adalah ujung tombak pendidikan. Tidak mungkin berharap kualitas pendidikan meningkat kalau kesejahteraan gurunya masih rendah.



Lalu Hadrian Irfani

"Jadi reformasi pendidikan mesti menempatkan guru sebagai salah satu prioritas utama," kata legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Karena itu, Pemerintah mesti segera menyusun desain kebijakan yang komprehensif apabila kewenangan pengangkatan guru benar-benar dikembalikan ke Pempus. "Desain tersebut perlu memastikan pemerataan distribusi guru, kesesuaian kebutuhan sekolah, rekrutmen berbasis kompetensi, serta kepastian kesejahteraan," harap dia.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menambahkan, sumber pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dialihkan

ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai 2027. "Banggar DPR dan Pemerintah telah menyepakati untuk gaji atau honorarium PPPK ditanggung oleh pusat melalui APBN," kata Said di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Menurut Said, mayoritas PPPK yang pembiayaannya bersumber dari APBD merupakan guru dan tenaga pendidik di daerah. Pengalihan sumber pembiayaan tersebut akan memberikan kepastian terhadap pembayaran gaji mereka.

Said mengatakan, kesepakatan tersebut juga merespons kekhawatiran PPPK mengenai keberlanjutan kontrak kerja. Karena itu, dengan anggaran Rp 23 triliun yang disepakati dalam RAPBN 2027 para PPPK tidak khawatir mengenai kebutuhan gaji tahun depan.

Ia menilai, PPPK memiliki peran penting dalam pelayanan publik, terutama sektor pendidikan di daerah. Karena itu, Banggar DPR memandang perlu memberikan kepastian terhadap kebutuhan anggaran mereka. Keputusan tersebut juga menindaklanjuti kesepakatan antara pimpinan DPR dan perwakilan PPPK yang sebelumnya meminta kejelasan mengenai keberlanjutan pekerjaan mereka.

Said menambahkan, kabar baik tersebut sekaligus memberi angin segar bagi daerah agar tidak

dibayang-bayangi lagi dengan berbagai persoalan yang terkait dengan kelangsungan PPPK ke depan. Hal itu juga akan meringankan beban APBD sehingga menjadi kesempatan bagi daerah untuk bisa menyelenggarakan agenda pembangunan karena berkurangnya beban anggaran rutin untuk PPPK.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Rihka Haluk mengatakan, pengalihan tata kelola guru dari Pemda ke Pempus perlu mendapat perhatian seiring dengan belum meratanya distribusi guru antarwilayah. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengawal pelaksanaan pengalihan tata kelola PPPK guru tersebut.

"Dengan mempertimbangkan pemerataan kebutuhan guru dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah, pengalihan tata kelola ke Pempus sebagai opsi yang perlu didukung regulasi dan mekanisme pelaksanaan yang jelas," kata Rihka di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Karena itu, kata Rihka, perlunya kejelasan skema pengalihan sebagai dasar bagi Pemda untuk melakukan tindak lanjut atau kebijakan tersebut. "Kami siap mengawal Pemda setelah mekanisme dan regulasi yang menjadi dasar pengalihan ditetapkan oleh kementerian dan lembaga terkait," pungkasnya. ■ TIF